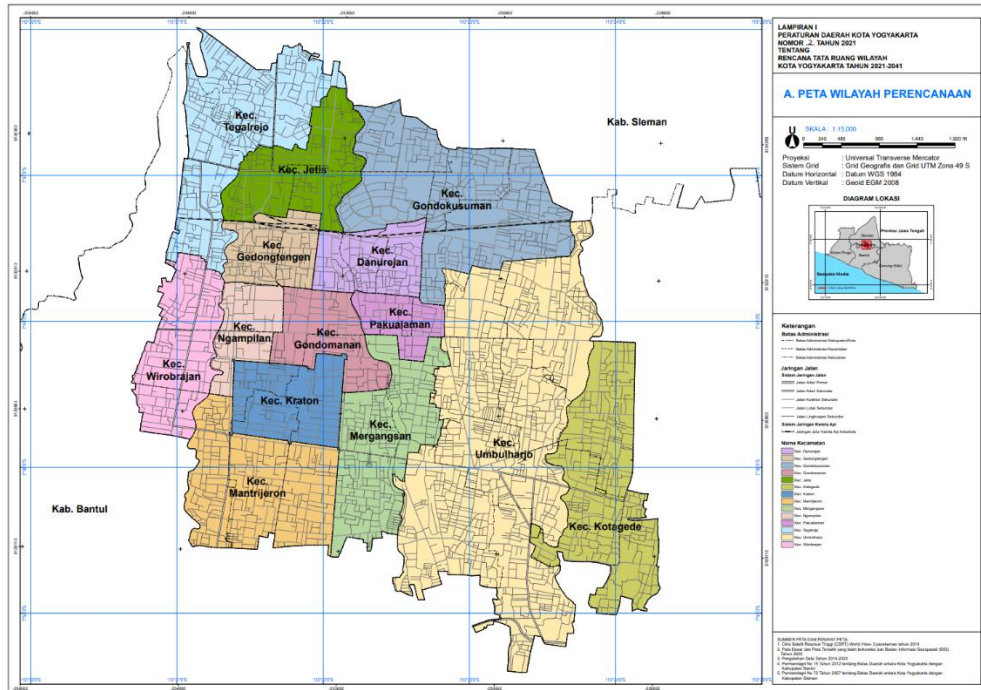


BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI

3.1 Kondisi Administratif Kota Yogyakarta



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta
(Sumber: Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2021)

Kota Yogyakarta berfungsi sebagai pusat administrasi dan simpul kegiatan pendidikan serta kebudayaan bagi wilayah DIY. Secara kewilayahan, kota ini terorganisasi ke dalam 14 kemantren yang membawahi 45 kelurahan. Berdasarkan data kewilayahan terbaru, struktur pemerintahan terkecil di kota ini didukung oleh keberadaan 616 unit RW dan 2.534 unit RT sebagai basis pelayanan masyarakat. Luas wilayah administratif Kota Yogyakarta mencapai sekitar 32,82 km², menjadikannya salah satu kota dengan luasan relatif kecil namun memiliki intensitas aktivitas yang tinggi di Indonesia. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 tercatat sekitar 415 ribu jiwa, dengan kepadatan rata-rata lebih dari 12.600 jiwa/km², menunjukkan karakter kota yang kompak dan padat (BPS Kota Yogyakarta, 2025).

Setiap kemantren di Kota Yogyakarta memiliki karakteristik fungsi kawasan yang berbeda-beda. Kemantren Gondomanan, Gedongtengen, dan Danurejan merupakan kawasan pusat kota yang didominasi fungsi perdagangan, jasa, dan pariwisata, termasuk kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer. Kemantren Umbulharjo memiliki luasan wilayah terbesar dan berkembang sebagai kawasan pendidikan dan permukiman. Sementara itu, Kemantren Kotagede memiliki karakter historis dan budaya yang kuat sebagai kawasan cagar budaya.

Pembagian fungsi wilayah ini mencerminkan struktur kota yang heterogen namun saling terintegrasi dalam mendukung identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya.

3.2 Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terletak di bagian tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kota Yogyakarta berada pada koordinat antara 110°24'19"–110°28'53" Bujur Timur dan 7°15'24"–7°49'26" Lintang Selatan. Luas wilayah administratifnya sekitar 32,82 km², menjadikannya salah satu kota dengan luas relatif kecil di Indonesia namun memiliki intensitas aktivitas perkotaan yang tinggi (BPS Kota Yogyakarta, 2025). Secara administratif, batas wilayah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Secara topografis, Kota Yogyakarta didominasi oleh bentang alam yang relatif landai karena lokasinya berada di atas endapan aluvial material vulkanik Gunung Merapi. Dengan elevasi rata-rata ±126 mdpl dan kemiringan lahan yang sangat rendah (0–2%), karakteristik fisik ini memberikan kemudahan bagi persebaran kawasan hunian serta infrastruktur urban secara masif. Kendati demikian, kondisi lahan yang datar menuntut sistem drainase yang sangat efisien guna meminimalisir risiko genangan air. Eksistensi tiga sungai utama yaitu Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong menjadi elemen krusial dalam menopang keseimbangan sistem hidrologi di wilayah perkotaan tersebut.

Secara klimatologis, Kota Yogyakarta diklasifikasikan ke dalam kategori iklim tropis basah yang ditandai dengan pergantian musim hujan dan kemarau secara periodik. Merujuk pada data BPS (2025), suhu tahunan rata-rata di wilayah ini berkisar antara 25,30°C hingga 27,60°C dengan tingkat kelembapan yang cukup signifikan. Catatan curah hujan tertinggi pada tahun 2024 menunjukkan angka 498 mm/bulan pada puncak musim penghujan, dengan total 156 hari hujan sepanjang tahun. Karakteristik iklim tersebut menjadi parameter krusial dalam perancangan ruang publik, khususnya dalam menentukan strategi peneduhan melalui vegetasi, sistem drainase yang responsif, serta penyediaan sarana proteksi terhadap radiasi matahari dan curah hujan tinggi.

3.3 Kondisi Non-Fisik Kota Yogyakarta

3.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam Angka 2025 tercatat sebanyak 415.600 jiwa pada tahun 2024, yang tersebar di 14 kemandren (kecamatan). Meskipun luas wilayahnya relatif kecil dibanding kabupaten/kota lain di DIY, Kota Yogyakarta memiliki intensitas aktivitas yang tinggi karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Mantrijeron	35.400
2	Kraton	21.320
3	Mergangsan	31.700
4	Umbulharjo	72.200
5	Kotagede	35.650
6	Gondokusuman	43.210
7	Danurejan	21.090
8	Pakualaman	10.590
9	Gondomanan	14.590
10	Ngampilan	17.920
11	Wirobrajan	28.270
12	Gedongtengen	19.140
13	Jetis	27.020
14	Tegalrejo	37.500
Total Penduduk		415.600

(Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta, 2025)

3.3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024 (%)
1	Mantrijeron	0,13
2	Kraton	-0,27
3	Mergangsan	0,38

4	Umbulharjo	-0,28
5	Kotagede	-0,37
6	Gondokusuman	-0,81
7	Danurejan	0,59
8	Pakualaman	0,50
9	Gondomanan	-0,63
10	Ngampilan	-0,76
11	Wirobrajan	-0,28
12	Gedongtengen	0,10
13	Jetis	0,90
14	Tegalrejo	0,84
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk		0,22

(Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta, 2025)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta pada periode 2020–2024 tercatat sekitar 0,22% per tahun (BPS Kota Yogyakarta, 2025). Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah dan cenderung stabil.

Penurunan laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan luas wilayah kota, tingginya harga lahan dan hunian, serta kecenderungan pergerakan penduduk ke wilayah penyangga seperti Kabupaten Sleman dan Bantul. Meskipun demikian, aktivitas harian Kota Yogyakarta tetap tinggi karena adanya mobilitas komuter, mahasiswa, dan wisatawan yang tidak tercatat sebagai penduduk tetap namun turut mempengaruhi kebutuhan ruang kota.

3.3.3 Kepadatan Jumlah Penduduk

Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	Mantrijeron	13.246
2	Kraton	15.509
3	Mergangsan	13.799
4	Umbulharjo	8.672
5	Kotagede	11.932
6	Gondokusuman	10.841

7	Danurejan	19.027
8	Pakualaman	16.381
9	Gondomanan	12.774
10	Ngampilan	21.327
11	Wirobrajan	15.968
12	Gedongtengen	19.429
13	Jetis	15.702
14	Tegalrejo	12.661
Total Penduduk		12.664

(Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta, 2025)

Kota Yogyakarta termasuk salah satu kota dengan tingkat kepadatan tinggi di Indonesia. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 mencapai sekitar 12.664 jiwa/km² (BPS Kota Yogyakarta, 2025).

Tingkat kepadatan ini tidak merata di setiap kecamatan. Kecamatan seperti Ngampilan, Gedongtengen, dan Danurejan memiliki kepadatan yang sangat tinggi karena luas wilayahnya kecil namun jumlah penduduk relatif besar. Sebaliknya, Umbulharjo memiliki kepadatan lebih rendah dibanding kecamatan pusat kota karena memiliki luasan wilayah yang lebih besar.

3.4 Karakter Sosial dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta

3.4.1 Budaya Srawung dan Interaksi Sosial

Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan karakter sosial yang kuat, di mana interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Konsep *srawung*, yang dalam bahasa Jawa berarti berinteraksi secara akrab, merupakan bagian dari nilai budaya yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Praktik *srawung* tidak hanya terjadi dalam konteks keluarga atau komunitas kecil, tetapi juga di ruang publik seperti angkringan, taman kota, pelataran kampus, hingga ruang terbuka di pusat kota.

Menurut penelitian mengenai ruang publik di Yogyakarta, ruang kota seperti Titik Nol Kilometer dan kawasan Malioboro dimanfaatkan tidak hanya sebagai ruang pergerakan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan ekspresi kolektif masyarakat (Nugroho, 2017). Aktivitas berkumpul, berdiskusi, serta menikmati suasana kota menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta memiliki kecenderungan menggunakan ruang publik sebagai tempat membangun relasi sosial.

Lebih lanjut, studi tentang perilaku masyarakat di ruang terbuka publik menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta cenderung memanfaatkan ruang secara fleksibel untuk aktivitas informal, seperti duduk bersama, berdiskusi, maupun melakukan kegiatan komunitas (Pratiwi & Setyowati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik di Yogyakarta tidak sekadar berfungsi sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk interaksi dan identitas kolektif.

Budaya *srawung* merepresentasikan kuatnya nilai kolektivitas yang menjadi akar kebudayaan di Yogyakarta. Sebagai entitas urban yang inklusif, kota ini menunjukkan keterbukaan terhadap diversitas latar belakang sosial, budaya, dan edukasi. Karakteristik tersebut semakin dipertegas oleh status Yogyakarta sebagai kota pelajar yang menjadi titik temu bagi mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara. Intensitas interaksi antarkelompok di berbagai ruang publik tidak hanya mempererat hubungan komunal, tetapi juga mengkatalis dinamika sosial yang progresif dan terbuka.

Dengan demikian, secara sosial, Yogyakarta memiliki karakter masyarakat yang terbiasa berinteraksi di ruang bersama. Namun, sebagian besar interaksi tersebut masih berlangsung di ruang semi-formal atau komersial, seperti warung kopi dan kafe. Hal ini menunjukkan adanya potensi sekaligus kebutuhan akan ruang publik non-komersial yang secara spasial dirancang untuk mendukung budaya *srawung* secara lebih optimal.

3.4.2 Budaya Literasi dan Kota Pelajar

Yogyakarta secara nasional dikenal sebagai “Kota Pelajar”. Julukan ini tidak terlepas dari tingginya jumlah institusi pendidikan tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY (2023), jumlah mahasiswa di wilayah DIY mencapai ratusan ribu setiap tahunnya, yang secara signifikan mempengaruhi dinamika sosial dan budaya kota.

Tingginya populasi mahasiswa berdampak pada berkembangnya budaya diskusi, kajian, dan kegiatan literasi di Yogyakarta. Berbagai komunitas literasi, bedah buku, diskusi publik, dan forum kajian sering diselenggarakan baik di kampus maupun di ruang-ruang alternatif seperti taman budaya, galeri seni, maupun ruang komunitas (Suminar, 2018). Aktivitas ini menunjukkan bahwa budaya belajar di Yogyakarta tidak terbatas pada ruang kelas formal, tetapi juga berkembang dalam ruang publik dan ruang informal.

Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat DIY tergolong relatif baik dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2022), DIY termasuk dalam kategori provinsi dengan tingkat aktivitas literasi masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota dengan budaya membaca dan diskusi yang aktif.

Namun demikian, sebagian besar aktivitas literasi dan diskusi masih terpusat di lingkungan kampus atau dalam event tertentu, seperti festival literasi dan pameran buku. Ruang publik yang secara permanen dan terintegrasi dirancang untuk mendukung kegiatan literasi informal lintas usia masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk menghadirkan ruang publik edukatif yang tidak hanya berfungsi sebagai taman atau tempat rekreasi, tetapi juga sebagai ruang belajar terbuka yang inklusif.

3.5 Tinjauan Ruang Publik Edukatif di Kota Yogyakarta

3.5.1 Jumlah Ruang Publik Edukatif

Ruang publik edukatif di Kota Yogyakarta pada praktiknya masih banyak “menumpang” pada dua kelompok utama, yaitu ruang terbuka hijau publik (RTHP) yang berpotensi memuat fungsi edukasi lingkungan dan aktivitas komunitas, serta fasilitas edukasi publik yang menyediakan sarana pembelajaran informal dalam bangunan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta tahun 2024, terdapat 64 RTH publik permukiman yang dikelola pemerintah kota. Selain itu, DLH juga mengelola taman pinggir jalan dan perindang dengan total luasan sekitar 76,7 hektare. Secara keseluruhan, capaian RTH Kota Yogyakarta tahun 2024 mencapai 23,351%, yang terdiri dari 8,063% RTH publik dan 15,288% RTH privat (DLH Kota Yogyakarta, 2024).

Jika merujuk pada pemetaan operasional melalui portal SILOKA (Sistem Informasi Lokasi Hijau Kota), kategori ruang publik hijau yang terdata meliputi:

- 15 taman interaktif dengan total luasan $\pm 9.553 \text{ m}^2$
- 94 taman pasif dengan total luasan $\pm 42.303 \text{ m}^2$
- Total luasan ruang yang terdata $\pm 51.856 \text{ m}^2$ (SILOKA Kota Yogyakarta, 2024)

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif ruang terbuka publik di Kota Yogyakarta relatif tersedia. Namun, apabila dikaji dari perspektif fungsi edukatif aktif, proporsi taman interaktif (15 unit) jauh lebih sedikit dibanding taman

pasif (94 unit). Taman pasif umumnya berfungsi sebagai ruang hijau relaksasi dengan vegetasi dan fasilitas duduk sederhana, sedangkan taman interaktif lebih berpotensi mengakomodasi aktivitas pembelajaran luar ruang seperti permainan edukatif, kelas komunitas, dan kegiatan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kota idealnya memiliki minimal 30% RTH dari total luas wilayah, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dengan capaian 23,351%, Kota Yogyakarta masih berada di bawah target ideal tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif dan proporsional, ketersediaan ruang terbuka hijau publik masih perlu ditingkatkan, terlebih apabila dikaitkan dengan kebutuhan fungsi sosial-edukatif.

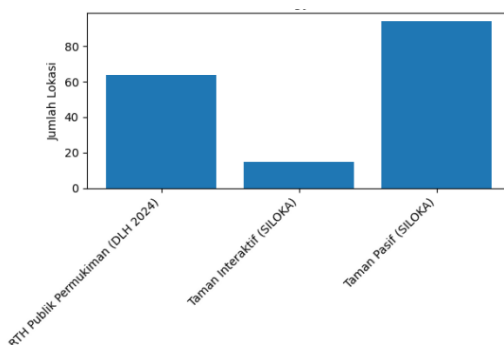
Lebih lanjut, apabila ruang publik edukatif dipahami sebagai ruang yang menggabungkan pembelajaran indoor dan outdoor dalam satu kesatuan spasial—misalnya ruang baca atau galeri yang terhubung langsung dengan plaza, amfiteater, atau taman belajar luar ruang—maka jumlahnya di Kota Yogyakarta masih sangat terbatas. Mayoritas ruang publik yang tercatat oleh DLH dan SILOKA berwujud ruang terbuka (outdoor), sementara fasilitas edukatif dengan komponen bangunan (indoor) yang terintegrasi langsung dengan ruang luar relatif jarang.

Salah satu contoh ruang publik edukatif hibrida di Kota Yogyakarta adalah Taman Pintar, yang dirancang sebagai kawasan pembelajaran informal dengan fasilitas bangunan seperti Gedung Oval, Gedung Kotak, dan zona PAUD, serta dilengkapi area luar ruang seperti playground dan alat peraga sains (Taman Pintar Yogyakarta, 2023). Namun, tipologi ruang publik edukatif hibrida seperti ini belum banyak ditemukan pada titik-titik RTH lainnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya gap bahwa kota memiliki cukup banyak titik ruang terbuka, tetapi belum banyak ruang publik yang benar-benar dirancang sebagai hub edukatif hibrida (*indoor-outdoor*) yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara fleksibel untuk literasi, diskusi, dan aktivitas komunitas harian.

3.5.2 Sebaran Ruang Publik Edukatif

Sebaran ruang publik edukatif di Kota Yogyakarta pada dasarnya mengikuti pola distribusi RTH publik yang tersebar di berbagai kemantren. Namun, distribusi kuantitatif tersebut tidak selalu sejalan dengan distribusi kualitas dan kapasitas ruang.



Gambar 3.2 Perbandingan Jumlah Ruang Publik Edukatif Kota Yogyakarta
(Sumber: Analisis Pribadi, 2026)

Perbandingan antara 15 taman interaktif dan 94 taman pasif menunjukkan bahwa ruang publik dengan karakter interaktif—yang berpotensi mengandung fungsi edukatif aktif—masih sangat terbatas secara kuantitatif (SILOKA Kota Yogyakarta, 2024). Taman pasif umumnya hanya menyediakan ruang hijau tanpa program aktivitas yang terstruktur, sedangkan taman interaktif memiliki fasilitas yang memungkinkan terjadinya pembelajaran luar ruang dan interaksi sosial.

Selain itu, pola sebaran ruang publik cenderung terkonsentrasi pada kawasan pusat kota dan koridor utama, seperti sekitar Malioboro, Taman Pintar, dan Alun-Alun. Kawasan tersebut memiliki intensitas aktivitas tinggi karena menjadi pusat wisata, perdagangan, dan kegiatan budaya (BPS Kota Yogyakarta, 2023). Sementara itu, di beberapa kawasan permukiman padat seperti Ngampilan, Wirobrajan, dan sebagian wilayah Umbulharjo, ruang publik yang tersedia umumnya berskala kecil dan lebih berfungsi sebagai ruang rekreasi dasar.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif ruang publik tersebar di seluruh kemandren, kualitas dan kapasitasnya tidak seragam. Ruang publik yang berada di pusat kota cenderung memiliki fasilitas lebih lengkap, sementara di kawasan permukiman padat, ruang publik lebih terbatas dan kurang terprogram.

Apabila dikaitkan dengan karakter ruang publik edukatif yang ideal—yakni ruang yang mengintegrasikan fungsi indoor dan outdoor secara terpadu—maka sebarannya di Kota Yogyakarta masih sangat terbatas. Taman Pintar menjadi pengecualian karena memadukan fasilitas bangunan (ruang pameran, ruang audio visual, planetarium) dengan area luar ruang interaktif. Namun, tipologi ruang publik edukatif hibrida semacam ini belum banyak dijumpai pada titik-titik RTH lainnya.

Dengan demikian, secara kuantitatif Kota Yogyakarta memiliki cukup banyak ruang terbuka publik, tetapi secara spasial dan fungsional distribusi ruang publik

edukatif yang benar-benar terintegrasi masih belum merata. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketersediaan ruang hijau dan kebutuhan ruang komunal edukatif yang mampu mewadahi literasi, diskusi, serta aktivitas belajar informal lintas usia.